

Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waeheru Kota Ambon

Joana J Tuhumury¹, Amir F Kotarumalos², Nurainy Latuconsina³

Universitas Pattimura & Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Kota Ambon

Corresponding Author: joanitatumury@gmail.com

Keywords:
Implementation;
Policy;
Empowerment;
Training;
Accompaniment.

Abstract: *This study aims to describe the implementation of community economic empowerment policies in Waiheru Village, Baguala District, Ambon City and the driving and inhibiting factors and what strategies need to be formulated as an effort to increase community economic empowerment in Waiheru Village, Baguala District, Ambon City. Indicators of driving factors: people's purchasing power which is high in neighboring villages, apart from the flow of people traffic (those shopping to the islands of Seram, Haruku and Saparua), the inhibiting factors are that there is no Road Map in making village head policies. Weak efforts to strengthen empowerment activities with community economic empowerment institutions. Aspects of the socio-political environment closely influence the economic empowerment policies of the common people. The findings of the indicators of community economic empowerment strategy in the village, namely the Policy Direction regarding the Standards and targets for empowerment should be aimed at micro and small businesses. Requires Training and Assistance Activities to strengthen business activities. Characteristics and mentality of implementing agents that are still distorted.*

Kata Kunci:
Implementasi;
Kebijakan;
Pemberdayaan;
Pelatihan;
Pendampingan.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon serta faktor pendorong dan penghambatnya serta strategi apa yang perlu dirumuskan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.. Indikator faktor pendorong: daya beli masyarakat yg tinggi pada desa-desa tetangga, disamping arus lalu lintas orang (yang berbelanja ke pulau seram, haruku dan saparua), faktor-faktor penghambat yaitu belum ada Road Map dalam pengambilan kebijakan kepala desa. Lemahnya upaya penguatan aktivitas pemberdayaan dengan lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek lingkungan sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Temuan indikator strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa yaitu Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran pemberdayaan harus ditunjukkan pada usaha mikro dan kecil. Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang.

PENDAHULUAN

Berfungsinya Jembatan Merah-Putih Menjadikan Jalur Jalan Masuk dan Keluar Kota Ambon dan Bandara Pattimura semakin ramai dilewati masyarakat, hal ini berdampak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah disepanjang jalur jalan tersebut termasuk pada desa waiheru. Potensi pasar di desa ini sangat berkembang pesat karena terletak pada jalur ramai di kota Ambon serta banyak pilihan dagangan yang ada membuat warga dari negeri lama sampai di batu koneng poka senang berbelanja di desa ini. Kalau potensi pasar dipergunakan sebaik mungkin oleh pemerintah Desa Waiheru dengan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah maka kesejahteraan warga akan lebih meningkat dari kondisi sebelumnya. Adapun hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Tuanaya, Tuhumury, dkk (2020), penyaluran bantuan social berdasarkan data yang lama, verifikasi data secara langsung kepada masyarakat (Tuanaya, Tuhumury, Wance, 2020), tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pemerintah

bertanggungjawab secara etis sesuai dengan prinsip akuntabilitas demokrasi (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2019), pelaporan hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat (Tuanaya, Wance, 2022), pemberi modal tidak ada kepastian waktu dan proses pelaksanaan program (Fernanto, Amiruddin, Maulana, 2022), penanaman nilai-nilai budaya kerja keras, keterbukaan tanggungjawab dalam upaya melakukan pemberdayaan (Noor, 2011), sinkronisasi serta penyesuaian berbagai program pemberdayaan (Kurniasari, Reswati, 2011).

Potensi pasar dalam skala usaha Mikro, kecil dan menengah di desa Waiheru jika diberdayakan dengan baik maka akan memicu peningkatan usaha-usaha tersebut serta dengan sendirinya dapat menyegarkan ekonomi masyarakat. Respons pemerintah dalam melatih, mengarahkan dan mengontrol masyarakat (Arfianto, Balahmar, 2014), aspek komunikasi, sumber daya dan disposisi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Sonda, dkk, 2020), perlu inovasi untuk peningkatan program (Wance, Kaliky, Syahidah, 2020), tingkat disiplin, pengembangan Pendidikan dan pelatihan (Alhadar, Suhu, Wance, dkk, 2020), pemberdayaan masyarakat sangat membantu pengembangan ekonomi (Kiu, 2018), rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat penerima manfaat (Nurhanifa,Iksan, 2019), perencanaan dan pendampingan pemberdayaan (Suhu, Wance, 2019). Berdasarkan temuan riset terdahulu, penelitian yang telah dilakukan memiliki perbedaan fokus pada lokus pemberdayaan di wilayah kepulauan, metode riset serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari hasil observasi lapangan tidak ditemukan pengembangan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha di Desa Waiheru, apa lagi kelas usaha mikro dan kecil. Hal ini nampak pada beberapa indikasi sebagai berikut : 1) Dana pengembangan ekonomi desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola BUMdesa dipergunakan untuk membangun kios dan kafe yang memiliki daya sumbang keuangan kecil bagi desa (Bahkan banyak sektor usaha yg tidak punya daya sumbang bagi kas Desa). 2) Pelaku usaha mikro seperti (Ibu-ibu penjual nasi kuning, bubur ayam, nasi kelapa, nasi goreng, gado-gado, penjual ikan dan lain-lain) menggerakkan usahanya dengan modalnya sendiri yang pas-pasan dan sering bangkrut akibat tidak memiliki modal usaha lagi akibat terdesak kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan anak serta biaya kesehatan jika sakit. 3) Manajemen usaha BUMdes diatur sesuka hati oleh Pemerintah Desa, seperti bidang usaha penyewaan kios dan lahan usaha lain berada langsung dibawah kontrol Pemerintah Desa tidak memberikan manfaat pada usaha mikro yang memang sangat membutuhkan. Banyak kios di pasar waiheru yang kosong mubazir dan tidak bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat. 4) Bendahara BUMdes tidak pernah memegang uang hasil usaha BUMdes langsung diambil dan dikelola oleh Bendahara Desa. 5) Keuntungan usaha tidak diseving atau untuk diputar modalnya dengan memberikan bantuan pinjaman lunak bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil namun dibagi pada perangkat desa dan diberikan sedikit untuk pengurus BUMdes. 6) Pelaku usaha di Desa Waiheru hampir secara keseluruhan mengandalkan modal usaha sendiri dan tidak ada peran BUMDes didalamnya, mulai dari sisi permodalan, pengembangan dan pemberdayaan usahanya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Informan Penelitian meliputi 1. Kepala Desa, 2. Sekertaris Desa, 3. Kabid Ekonomi dan Pembangunan, 4. Anggota BPD, 5. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tokoh masyarakat, 6. Para Akademisi. Analisa Data : Model Analisa Kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014), yang meliputi langkah-langkah, Kondensasi data, Sajian data dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon serta - Faktor pendorong dan penghambatnya dan strategi apa yang perlu dirumuskan dalam meningkatkan upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Dalam mengukur Variabel Kebijakan Pemerintah Desa Waiheru dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya, dirumuskan Fokus dan Diskripsi Fokus Penelitian, sebagai berikut : Fokus Penelitian 1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Diskripsi

Fokus Penelitian 1) Pendataan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. 2) Pelaksanaan Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Pemberian Bantuan Usaha. 5) Pelaporan Perkembangan Usaha sasaran Bantuan. Fokus Penelitian 2. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn digunakan dalam melihat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Kelengkapan Panduan tentang Standar dan sasaran kebijakan. 2) Sumberdaya Strategis Sasaran (Pasar). 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Pemberdayaan. 4) Karakteristik agen pelaksana di Tingkat Desa. 5) Lingkungan sosial dan politik. Fokus Penelitian 3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumberdaya diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk Penguatan Aktivitas Usaha. 4) Meluruskan Karakteristik agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perbaiki sikap mental para pelaksana dalam berusaha.

HASIL DAN DISKUSI

Sabatier dan Mazmanian (1983), mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara 'menggambarkan struktur' proses implementasi tersebut.

Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (Wibawa, 1989:26) akan terlihat dalam skema berikut :

Gambar 1. Skema Proses Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian



Studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sekali program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pressman dan Wildavsky (1979) mengutip apa yang dikatakan oleh Udoji bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Islamy (1988) mengemukakan, bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.

Sabatier dan Mazmanian (1983), mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara 'menggambarkan struktur' proses implementasi tersebut. Sementara itu George C Edward III

menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan (Wahab, 1990). Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

Bardach (1977) mengartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar-menawar antara instansi pemerintah. Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (*tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil (*out comes*) dari aktivitas pemerintah. Disamping itu implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penghantaran / penyerahan kebijakan. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya (Effendi, 2000).

Pada sisi lain pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat (Arsiyah 2002). Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian "pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005).

Jim Ife, dalam Zubaedi (2007), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Sedangkan oleh Sumodinigrat sebagai mana dikutip dan diuraikan lebih mendalam oleh Syamsir Salam dan Amir Fadhilah (2008:235) bahwa kosep pemberdayaan lebih terkait dengan usaha untuk meningkatkan kemampuan atau kemandiria masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang: *pertama*, penciptaan suasana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik maupun social, serta pengembangan kelembagaan di daerah; *ketiga*, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah pesaingan yang tidak seimbang, dan

menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, yang oleh Chambers dikatakan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Dalam Zubaedi (2013).

Fokus Penelitian 1, Diskripsi Penelitian - 1) Tidak pernah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk diadakan pembinaan guna pemberdayaan dan pengembangan usaha ke depan, Diskripsi Fokus Penelitian 2) Pada prinsipnya pendataan sebagai langkah awal untuk memproyeksi medan usaha guna pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi kesalahan diskresi pemerintah desa dengan menghambur-hamburkan uang desa untuk pembangunan Cooffee di atas tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. Diskripsi Fokus Penelitian 3) Belum pernah ada program kewirausahaan secara kolektif kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerinta Desa Waiheru. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik (Jalan Setapak, Gorong-gorong, dan Talud), yang dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. - Pemerintah Desa masih fokus pada Program internal, BunDes lagi membangun tempat usaha (Cooffee Dewa), Cuma masih terbentur masalah tanah pada lokasi usaha yang baru ini. Pemerintah Desa sadar akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan sudah bias dipakai untuk membuat program Kewirausahaan di Desa ini, baru dibuat program kewirausahaan. Diskripsi Fokus Penelitian 4) Bantuan Usaha Kepada Pedagang Kecil secara kolektif dan merata tidak pernah diberikan - Karena dananya terbatas sehingga pemberiannya dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan personal ke dalam. Diskripsi Fokus Penelitian 5) Pemerintah Desa Tidak Pernah mencari serta menghimpun data dan Membuat Pelaporan tentang Perkembangan Usaha sasaran dari bantuan desa, karena bantuan desa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak pernah diberikan.

Hasil Fokus Penelitian 2, - Faktor Pendorong : Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Daya beli masyarakat yg tinggi pada desa-desa tetangga, disamping arus lalu lintas orang (yang berbelanja ke pulau seram, haruku dan saparua). Jika usaha masyarakat bisa dikembangkan dengan baik dan dibina oleh pemerintah desa maka usaha akan berkembang dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. - Faktor-Faktor Penghambat : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Desa Waiheru belum memiliki Kelengkapan Panduan tentang Standart dan Sasaran Kegiatan Usaha yang menjadi peta jalan (Road Map) dalam Pengambilan Kebijakan Kepala Desa tentang Pemberdayaan Usaha Mikra, Kecil dan Menengah di Desanya. Diskripsi Fokus Penelitian 2) Pemerintah Desa tidak pernah melakukan Komunikasi antar Organisasi dan tidak pernah melakukan upaya Penguatan aktivitas Pemberdayaan dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Diskripsi Fokus Penelitian 3) Karakter agen pelaksana di tingkat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dari warga masyarakatnya sendiri. Diskripsi Fokus Penelitian 4) Aspek lingkungan sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat Centri petal, karena pemerintah desa secara politis selalu mempolitisir berbagai bantuan masyarakat untuk Filantropy politik disisi lain pilih kasih dalam setiap kebijakan terutama dalam pembagian bantuan pada masyarakat yang berhak menerimanya.

Fokus Penelitian 3. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mikro, Kecil dan Menengah), harus ditempuh Strategi Kebijakan seperti, 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. 4) Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha.

Fokus Penelitian 1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : a. Pendataan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya tidak pernah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk dilakukan pembinaan guna pemberdayaan dan pengembangan usaha ke depan. b. Sosialisasi Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Desa. Pendataan sebagai langkah awal untuk memproyeksi medan usaha guna pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi kesalahan diskresi pemerintah desa dengan menghambur-hamburkan Anggaran Desa untuk pembangunan Cooffee di atas tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. c. Pelaksanaan Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Belum pernah ada program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Waiheru. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik (Jalan Setapak, Gorong-gorong, dan Talud), yang dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. - Pemerintah Desa sadar akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan sudah bias dipakai untuk membuat program Kewirausahaan di Desa ini, baru dibuat program kewirausahaan. - Pada bulan puasa tahun 2020 pernah pemerintah desa melalui BunDes membuat meja-meja jualan Takjil untuk dijual pada Ibu-ibu Penjual Takjil Waktu itu, namun karena harganya terlalu mahal (Satu meja 1 juta Rupiah), lalu ditolak oleh Ibu-ibu bahkan ada demo waktu itu, kata ibu-ibu bukannya meringankan malah memberatkan kami. Untuk program kewirausahaan yang terencana tidak pernah ada. Hal ini juga pernah juga diusulkan, namun tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. d. Pemberian Bantuan Usaha. - Bantuan Usaha Kepada Pedagang Kecil secara merata tidak pernah diberikan - Karena dananya terbatas sehingga pemberiannya dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan personal ke dalam.

Temuan Fokus Penelitian 2. Diskripsi Fokus Penelitian 1. Faktor Pendorong : Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Jika usaha masyarakat bisa dikembangkan dengan baik dan dibina oleh pemerintah desa maka usaha akan berkembang dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. Diskripsi Fokus Penelitian 2. Faktor-Faktor Penghambat : - Desa Waiheru belum memiliki Kelengkapan Panduan tentang Standart dan Sasaran Kegiatan Usaha yang menjadi peta jalan (Road Map) dalam Pengambilan Kebijakan Kepala Desa tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desanya. - Pemerintah Desa tidak pernah melakukan Komunikasi antar Organisasi dan tidak pernah melakukan upaya Penguatan aktivitas Pemberdayaan dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. - Karakter agen pelaksana di tingkat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dari warga masyarakatnya sendiri. - Aspek lingkungan sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat Centri petal, karena pemerintah desa secara politis selalu mempolitisir berbagai bantuan masyarakat untuk Filantropy politik disisi lain pilih kasih dalam setiap kebijakan terutama dalam pembagian bantuan pada masyarakat yang berhak menerimanya.

Temuan Fokus Penelitian 3. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mikro, Kecil dan Menengah), harus ditempuh dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. Diskripsi Fokus Penelitian 2) Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diskripsi Fokus Penelitian 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. 4) Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha.

KESIMPULAN

Adapun temuan indikator implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut: 1) Pendataan sebagai langkah awal untuk memproyeksi medan usaha guna pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi kesalahan diskresi pemerintah desa dengan menghambur-hamburkan uang desa untuk pembangunan Cooffee di atas tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. 2) Belum pernah ada program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Waiheru. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik (Jalan Setapak, Gorong-gorong, dan Talud), yang

dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. Pemerintah Desa masih fokus pada Program internal, BumDes lagi membangun tempat usaha (Cooffee Dewa), Cuma masih terbentur masalah tanah pada lokasi usaha yang baru ini. Pemerintah Desa sadar akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan sudah biasa dipakai untuk membuat program Kewirausahaan di Desa ini, baru dibuat program kewirausahaan. 3) Bantuan Usaha Kepada Pedagang Kecil secara merata tidak pernah diberikan karena dananya terbatas sehingga pemberiannya dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan personal ke dalam. 5) Pemerintah Desa Tidak Pernah mencari serta menghimpun data dan Membuat Pelaporan tentang Perkembangan Usaha sasaran dari bantuan desa, karena bantuan desa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak pernah diberikan.

Adapun temuan indikator faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ditemukan kenyataan bahwa terhambatnya Kebijakan Perdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu sebagai berikut: a. Desa Waiheru belum memiliki Kelengkapan Panduan tentang Standart dan Sasaran Kegiatan Usaha yang menjadi peta jalan (*Road Map*) dalam pengambilan kebijakan kepala desa tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Waeheru. b. Pemerintah Desa tidak pernah melakukan Komunikasi antar Organisasi dan tidak pernah melakukan upaya Penguatan aktivitas Pemberdayaan dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. c. Karakter agen pelaksana di tingkat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dari warga masyarakatnya sendiri. d. Aspek lingkungan sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat *Centri petal*, karena pemerintah desa secara politis selalu mempolitisir berbagai bantuan masyarakat untuk *Filantropy* politik disisi lain pilih kasih dalam setiap kebijakan terutama dalam pembagian bantuan pada masyarakat yang berhak menerimanya. b. Faktor Pendorong: Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Jika usaha masyarakat bisa dikembangkan dengan baik dan dibina oleh pemerintah desa maka usaha akan berkembang dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Adapun temuan indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yaitu sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. 2. Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. 4. Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5. Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha.

REFERENSI

- Arsiyah. (2002). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya Malang. Malang.
- Alhadar, H., La Suhu, B., Wance, M., Noviyanti, V., & Adam, K. (2020). Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil Masyarakat Desa Madopolo Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 1(2), 25-31.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66.
- Bardach, Eugene. 1977. *The Implementation Game*. Cambridge : MIT Press.
- Effendy, Onong Uchyana. 2000. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT.Rosdakarya. Bandung.
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194-214.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Islamy, M. Irfan. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.

- Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 7-13.
- Kiu, Y. M. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 100-112.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Nurhanifa, D., Tjoetra, A., & Ikhsan, I. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 108-110.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public. Policy*. HarperCollins. New York.
- Pressman, J.L., & Wildavsky, Aaron. 1979. *Public Policy Implementation*. University of California Press and Los Angles. California.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- Sonda, J., KIYAI, B., & Kolondam, H. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62).
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama. Jakarta.
- Syamsir Salam dan Amir Fadhilah. 2008. *Sosilogi Pedesaan*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). Management Model And Village Fund Allocation During Pandemic Covid-19 In Waiheru Village Ambon City Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 13357-13369.
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). The Scheme of Cash Transfer Distribution during the Covid-19 Period through the Waeheru Village Fund, City of Ambon. *Sosiohumaniora*, 24(3).
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*. Cet.Ke-1. Intermedia. Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *Pembangunan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Cet. I. Ar Ruzz Media Group. Yogyakarta